

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, J. Z., & Syamsah, T. (2018). Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 10(1), 45.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior* (2nd ed.). Milton-Keynes: Open University Press/McGraw-Hill.
- Anshori, M., Iswati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Edisi 1*. Airlangga University Press.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, I Gusti Ayu Mas., Kadek Wulandari Laksmi P. 2019. Efektivitas e-Samsat, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 4: 50-61.
- Dharma, A.S., Astika, P. 2021. Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-jurnal akuntansi*, 31: 1615-1631.
- Fitri, A. M. N. ., & Muthya, R. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (P3dw) Kabupaten Bandung I Rancaekek. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 584–590.
- Gujarati, Damodar N., Dawn C. Porter. 2015. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunawan, C. 2018. *Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data Dengan IBM SPSS Statistic 25)*. Deepublish. Yogyakarta.
- Gustaviana, S. 2020. Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang). *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1: 20-29.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.

- Latrini, M. Y., & Gayatri, G. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1591.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nini. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Tarif Pajak Progresif, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sistem Samsat Drive THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 2: 49-54.
- Paramita, Ratna Wijayanti Daniar and Rizal, Noviansyah and Sulistyan, Riza Bahtiar (2021) Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 3. Widya Gama Press, pp. 1-170. ISBN 978-623-95051-5-8
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2023. Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023. Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2023, Subyek Pajak Kendaraan Bermotor merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- Priantara, Diaz. 2012, Perpajakan Indonesia. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana.
- Rasyid, F.F. 2022. Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2: 143-146.
- Republik Indonesia. 2022. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmah, R. F. M., Suyanto, U. Y., Suyanto, U. Y., Sulistyowati, R., & Sulistyowati, R. (2022). Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 5(1), 109–123.
- Silooy, R.W. 2021. Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kotaambon (Studi Empiris Pada Wpop Di Kantor Samsat Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi*, 7 : 17-30.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.